

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah melihat tentang relasi antara pemilik kapital dengan kekuasaan dalam tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Permasalahan yang diangkat dalam studi ini mengenai adanya kebijakan kawasan agropolitan yang menunjuk Kabupaten Nganjuk dengan bawang merah sebagai komoditas unggulannya, tetapi justru kurang mensejahterakan petaninya dan lebih menguntungkan pemilik kapital. Teori yang digunakan dalam studi ini adalah teori regulasi ekonomi, dengan perspektif ekonomi politik. Teori Regulasi Ekonomi memberikan penjelasan akan pemerintah sebagai pemberi kebijakan berupa aturan, dan sektor swasta adalah bagian dari regulasi kebijakan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya akan informasi melalui penggalian data untuk menghasilkan deskripsi data yang lengkap. Studi dimaksudkan untuk memberikan gambaran relasi antara kapital dengan kekuasaan dalam tata niaga yang meliputi proses produksi hingga distribusi beserta aktor yang terlibat dan memiliki peranan penting.

Hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa kapital memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, guna merepresentasikan kepentingan mereka dalam prosesnya. Suatu kebijakan selalu memberikan dampak positif dan negative beserta konsekuensi bagi pihak terlibat. Realisasi kebijakan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk memberikan konsekuensi pengendalian tata niaga bawang merah oleh para pemilik kapital sebagai konsekuensi, namun di sisi lain kapital dibutuhkan karena tidak semua petani sepenuhnya mandiri. Penguasaan kapital dalam tata niaga bawang merah berlangsung melalui adanya penanaman modal uang dan bantuan pemasaran bagi distribusi hasil panen, sehingga mereka dapat bebas mengendalikan laju distribusi dengan acuan sistem pasar dalam mengatur peredaran stok dan harga. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan kawasan agropolitan lebih menempatkan petani selaku tuan rumah yang menanggung segala resiko produksi, sebagai penerima konsekuensi dari regulasi kebijakan. Sementara pemilik kapital yang tidak menanggung resiko produksi, justru banyak memperoleh manfaat dari regulasi kebijakan dengan mendapat keuntungan berlipat ganda.

Kata Kunci: Ekonomi pertanian, kebijakan, Pemerintah Daerah Nganjuk, kapitalisme perdagangan, tata niaga.